



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANANG YAHMADI
2. Jabatan : EXECUTIVE VICE PRESIDENT ENJINIRING DAN PERENCANAAN PENGADAAN
3. NHK : 478007

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 7.350.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 211 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah Seluas 216 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2362 m2/500 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
5. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 960.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VIOS 1.5 G Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOBIL, SUZUKI SEDAN / BALENO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. MOBIL, TOYOTA SEDAN / CAMRY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000



5. MOTOR, YAHAMA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.149.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	390.000.000
Sub Total	Rp.	9.849.000.000
III. HUTANG	Rp.	5.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.844.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.